

Implementasi Program Kemitraan Plasma Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Desa: Studi di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah

Jajasmara Gussuvi Nugroho

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Terbuka

Email Korespondensi: jajasmara75@gmail.com



INFO ARTIKEL

Research Article

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program plasma kelapa sawit, kesejahteraan, ekonomi desa

Keyword : *Policy Implementation, Palm Oil Plasma Program, Welfare, Village Economy*

Article History

Dikirim : 03 Desember 2024

Diterima: 20 Desember 2024

Dipublikasi: 02 Februari 2025

ABSTRAK

Program kemitraan plasma kelapa sawit merupakan salah satu model pembangunan ekonomi perdesaan berbasis agribisnis yang melibatkan kerja sama antara perusahaan inti dan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kemitraan plasma di Desa Air Dua, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, serta melihat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus, melalui wawancara terhadap kepala desa, pengurus KUD, perusahaan inti, dan petani plasma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan mulai dari pembukaan lahan, pemeliharaan kebun, pemanenan, pembiayaan, hingga pencatatan hasil dan utang sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan inti. Namun, perusahaan menunjukkan keterbukaan melalui rapat evaluasi bulanan yang melibatkan KUD sebagai representasi petani. Meskipun hubungan kemitraan ini menunjukkan pola yang relatif stabil dan transparan, posisi tawar petani masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan KUD dan literasi ekonomi petani agar kemitraan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The palm oil plasma partnership program is a model for agribusiness-based rural economic development that involves collaboration between a core company and farmers. This study aims to analyze the implementation of the plasma partnership in Air Dua Village, Sukamara Regency, Central Kalimantan, and examine its contribution to the welfare of the village community. The method used was a qualitative approach with a case study technique, through interviews with the village head, KUD (Village Unit Cooperative) administrators, the core company, and plasma farmers. The results show that the entire management process, from land clearing and plantation maintenance, harvesting, financing, to recording yields and debts, is entirely carried out by the core company. However, the company demonstrates transparency through monthly evaluation meetings involving the KUD as a representative of the farmers. Although this partnership demonstrates a relatively stable and transparent pattern, the farmers' bargaining position remains weak. Therefore, strengthening the institutional capacity of the KUD and increasing farmers' economic literacy is necessary to ensure a more equitable and sustainable partnership.

Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, maupun pembangunan kawasan perdesaan. Salah satu model pengelolaan perkebunan yang berkembang sejak era Perkebunan Inti Rakyat (PIR) adalah sistem kemitraan inti-plasma, yang mengintegrasikan perusahaan inti dengan petani plasma melalui kelembagaan koperasi atau kelompok tani (Wildayana, 2019; BPDPKS, 2022). Pola ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta mendongkrak kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Namun demikian, implementasi program kemitraan plasma kelapa sawit di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak seragam. Di beberapa daerah seperti Sulawesi Tengah, relasi antara petani plasma dan perusahaan inti cenderung timpang, diwarnai dengan ketidaktransparan informasi, dominasi perusahaan, dan lemahnya kapasitas kelembagaan petani (Ambarsari, 2021; Kurniawan et al., 2021). Hal serupa juga ditemukan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, di mana kemitraan seringkali belum berjalan optimal karena minimnya evaluasi kebijakan dan lemahnya kontrol aktor lokal. (Lesmana & Jumansyah, 2024; Asik, 2017)

Studi di beberapa wilayah Kalimantan lainnya, seperti di Desa Jatiwaringin, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, juga menunjukkan masih adanya persoalan dalam kinerja kemitraan plasma. Penelitian oleh Bere, Pudjiastuti, dan Setiaji (2024) mengungkapkan bahwa peran koperasi sebagai perantara belum maksimal, sementara partisipasi petani dalam pengambilan keputusan rendah akibat keterbatasan akses terhadap informasi dan jejaring. Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan kemitraan plasma sangat bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi, dan pola kolaborasi antaraktor dalam jaringan kebijakan lokal (Kusumastanto & Wahyudi, 2020; Klijn & Koppenjan, 2016).

Di tengah kecenderungan umum tersebut, Kabupaten Sukamara di Kalimantan Tengah

menunjukkan dinamika yang berbeda. Berdasarkan temuan awal di lapangan, program kemitraan plasma kelapa sawit di wilayah ini relatif lebih terbuka dan inklusif dibanding daerah lain. Pemerintah desa, koperasi petani (KUD), dan perusahaan inti menjalin kolaborasi yang cukup erat, dengan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih transparan. Kondisi ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi petani plasma, memperkuat.

Gap penelitian muncul dari sedikitnya kajian yang menyoroti daerah dengan praktik kemitraan yang relatif berhasil, seperti di Kabupaten Sukamara. Selama ini, literatur lebih banyak menyoroti ketimpangan dan permasalahan struktural dalam hubungan inti-plasma, tetapi belum banyak yang mengangkat kasus-kasus di mana kemitraan berjalan secara kolaboratif dan adaptif. Oleh karena itu, studi ini penting dilakukan untuk menggali lebih jauh bagaimana implementasi program kemitraan plasma di Kabupaten Sukamara mampu menciptakan model hubungan yang lebih terbuka, adil, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan teori jaringan (network theory), penelitian ini berupaya mengidentifikasi aktor kunci, pola interaksi, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kemitraan dalam konteks lokal.

Penulis memilih studi kasus program kemitraan plasma kelapa sawit karena melihat langsung bagaimana skema ini memengaruhi kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam praktiknya, program ini memperlihatkan ciri khas yang relatif berbeda dibanding daerah lain, terutama dari segi keterbukaan informasi dan partisipasi petani dalam proses pengelolaan hasil. Di tengah banyaknya permasalahan tersebut, praktik kemitraan di Kabupaten Sukamara justru menunjukkan beberapa hal positif. Petani plasma diundang secara rutin dalam rapat pembebanan biaya dan evaluasi pendapatan, serta dilibatkan dalam proses perhitungan secara terbuka. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dapat menjadi contoh penerapan model kemitraan yang lebih partisipatif dan transparan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah Bagaimana implementasi program kemitraan plasma kelapa sawit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa?

Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Jaringan (Network Theory) sebagai pisau analisis. Teori Jaringan atau Network Theory merupakan pendekatan analisis kebijakan publik yang melihat proses kebijakan sebagai hasil dari interaksi kompleks antar berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan posisi berbeda dalam jaringan. Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap model birokrasi tradisional yang memandang proses kebijakan secara hierarkis dan terpusat. Dalam konteks Teori Jaringan, kebijakan tidak hanya dihasilkan oleh institusi negara, tetapi melalui negosiasi, kolaborasi, dan konflik antara berbagai aktor di dalam jejaring kebijakan tersebut (Klijn & Koppenjan, 2016).

Menurut Klijn dan Koppenjan (2016), jaringan kebijakan adalah suatu bentuk tata kelola (governance) yang mencerminkan ketergantungan aktor-aktor satu sama lain dalam mencapai tujuan kolektif. Hubungan ini tidak selalu simetris karena ada perbedaan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Namun, keberhasilan jaringan justru terletak pada kemampuan aktor-aktor untuk menjalin komunikasi, membangun kepercayaan, serta menyusun kesepakatan dalam kondisi ketidakpastian. Dalam program kemitraan plasma kelapa sawit, aktor-aktor utama terdiri dari: perusahaan inti, petani plasma, Koperasi Unit Desa (KUD), pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau pihak pendamping. Saragih, Lubis, & Nugroho (2021) menekankan bahwa kolaborasi antar aktor dalam jaringan kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan sangat menentukan keberhasilan kebijakan, terutama ketika melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Dalam jaringan ini, peran pemerintah sering kali beralih dari penguasa menjadi fasilitator yang menjamin keberlangsungan komunikasi dan koordinasi antar aktor. Jaringan kebijakan memiliki sejumlah karakteristik penting: saling ketergantungan antaraktor, pertukaran sumber daya, proses negosiasi yang kompleks, dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Kusumastanto dan Wahyudi (2020) menjelaskan bahwa dalam konteks kemitraan perkebunan kelapa sawit, keberhasilan implementasi ditentukan oleh kuatnya relasi jejaring aktor. Perusahaan yang tidak membangun komunikasi

partisipatif dengan petani sering kali memicu konflik horizontal dan vertikal yang menghambat keberlanjutan program plasma.

Untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan manajemen jaringan yang efektif. Klijn dan Koppenjan (2016) mengemukakan bahwa manajemen jaringan melibatkan tiga strategi utama: strategi proses (process management), strategi struktural, dan strategi isi. Dalam konteks lokal, Nahrawi et al. (2021) menyebutkan bahwa keberhasilan program pembangunan berbasis desa sangat bergantung pada pengelolaan jaringan yang adaptif. Pemerintah daerah perlu mengambil peran sebagai Network Administrative Organization (NAO) untuk menjaga stabilitas jaringan, mengatur alur informasi, dan memastikan tidak ada aktor yang termarginalkan. Penerapan teori jaringan sangat relevan dalam menjelaskan dinamika program kemitraan plasma kelapa sawit. Program ini merupakan bentuk kolaborasi lintas aktor yang tidak bisa dikendalikan hanya oleh satu pihak. Keberhasilan kemitraan bergantung pada bagaimana semua aktor menjalin komunikasi dua arah, memiliki rasa saling percaya, berkomitmen terhadap kesepakatan, dan mematuhi kerangka regulasi bersama. Namun dalam praktiknya, banyak ditemukan asimetri informasi, dominasi aktor tertentu (biasanya perusahaan), dan lemahnya posisi tawar petani. Di sinilah pentingnya manajemen jaringan untuk menciptakan tata kelola kemitraan yang adil dan berkelanjutan.

Efektivitas program tersebut pun dipertanyakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, efektivitas pendidikan politik oleh partai di tingkat masyarakat hanya mencapai 38,31% kategori yang termasuk rendah. Dalam konteks ini, sangat mungkin bahwa masyarakat lebih banyak mendapat pendidikan politik dari lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan media, daripada dari partai politik itu sendiri (Hasyim & Azkia, 2023). Bahkan partai politik justru menjadi aktor dominan dalam pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran administratif (Ningrum, 2024). Situasi ini menimbulkan kontradiksi di satu sisi partai berbicara tentang pendidikan politik, tetapi di sisi lain justru memperlihatkan praktik politik yang tidak mendidik. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa peran pendidikan politik oleh partai dalam

konteks ini belum dapat dikatakan sebagai faktor dominan dalam peningkatan suara. Ia memang penting dan perlu, namun belum berjalan secara maksimal dan belum menyentuh semua segmen masyarakat. Jika dibiarkan hanya sebagai kewajiban formal atau alat kampanye, maka pendidikan politik akan kehilangan makna sejatinya sebagai proses pemberdayaan warga negara dalam sistem demokrasi. Dengan ini pendidikan politik perlu dikuatkan dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan transparansi. Bukan hanya menjelang pemilu, tetapi menjadi proses berkelanjutan yang melibatkan semua pihak: partai, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, serta lembaga pendidikan. Dengan demikian, peningkatan suara dalam pemilu tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga merepresentasikan kualitas partisipasi warga negara yang sadar, kritis, dan aktif secara politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Desa Air Dua, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Informan utama terdiri dari Kepala Desa Air Dua, Ketua KUD Rauk Penagung, perwakilan dari PT. Kalimantan Sawit Kusuma, dan petani plasma. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi rapat dan arsip koperasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur agar informan dapat menjelaskan secara terbuka mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kemitraan.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk menyeleksi data penting yang sesuai dengan fokus penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk naratif dan tematik. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori jaringan (Network Theory), yang menekankan pentingnya interaksi dan komunikasi antaraktor dalam jaringan kebijakan. Proses ini menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika implementasi program

plasma dalam konteks lokal.

Hasil dan Pembahasan

1. Program Kelapa Sawit di Kabupaten Sukamara

Program kemitraan plasma kelapa sawit merupakan salah satu inovasi kebijakan pembangunan agribisnis yang dirancang untuk menjembatani kepentingan antara perusahaan besar sebagai pelaku ekonomi skala besar dan petani lokal sebagai pemilik sumber daya lahan. Di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, sistem ini telah berkembang melalui skema kerja sama antara petani lokal melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan PT Kalimantan Sawit Kusuma (perusahaan inti) sebagai lembaga pengelola plasma. Dalam konteks lokal ini, kemitraan plasma tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga memainkan peran sosial yang signifikan dalam mendinamisasi struktur masyarakat desa, membuka lapangan kerja, serta memperluas integrasi masyarakat ke dalam sistem pasar. Struktur kemitraan ini dibangun atas dasar tiga aktor utama. Pertama, perusahaan inti sebagai pihak yang menjembatani teknis, administratif, penyedia modal, teknologi, dan sistem manajemen produksi. Kedua, petani plasma sebagai pemilik lahan yang dikonversi menjadi kebun sawit dan penerima hasil dari skema bagi hasil. Ketiga, KUD Rauk Penagung yang menjadi lembaga penghubung antara petani dan perusahaan. Selain ketiga aktor utama tersebut, terdapat juga aktor pendukung seperti pemerintah desa, yang berfungsi sebagai pengawas sosial dan mediator konflik, serta dinas teknis pemerintah daerah yang melakukan pembinaan kebijakan dan penguatan kelembagaan.

Implementasi program ini dimulai dari proses sosialisasi, pendataan calon petani peserta, perjanjian kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU), dan pembukaan lahan oleh perusahaan. Lahan plasma yang seharusnya dikelola oleh petani secara formal, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan, dengan petani bekerja sebagai tenaga kerja di lahan miliknya sendiri. Hal ini menciptakan hubungan produksi yang unik: petani tetap mendapatkan hasil dari lahan tersebut berdasarkan

perjanjian bagi hasil, namun dengan ketentuan potongan biaya produksi dan utang yang besarannya ditentukan oleh perusahaan. Kondisi ini menimbulkan dinamika ketergantungan struktural yang jika tidak dikelola secara adil berpotensi menurunkan kemandirian petani.

KUD memiliki peran sebagai institusi perantara. KUD hanya menerima laporan dari perusahaan inti selaku pengelola yang mengatur dan mencatat hasil panen, melakukan pembagian hasil bersih plasma setelah dikurangi berbagai komponen biaya, mencatat utang-piutang yang nantinya akan disampaikan ke para petani plasma. KUD juga menjadi pelaksana rapat evaluasi tahunan (RAT) yang dihadiri perusahaan, pemerintah desa, dan perwakilan petani. Kelemahan KUD terletak pada kapasitas kelembagaan yang belum kuat. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan yang diberikan kepada pengurus tidak berlangsung kontinu, manajemen keuangan masih bergantung pada perusahaan, dan transparansi dalam menjelaskan laporan keuangan kepada petani belum optimal. Banyak petani yang tidak memahami rincian potongan dan biaya produksi, karena tidak memiliki kapasitas untuk membaca dan menafsirkan laporan keuangan koperasi secara kritis. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pengetahuan dalam relasi ekonomi ini.

Pemerintah desa memiliki posisi strategis, meskipun fungsinya lebih bersifat informal dan sosial. Kepala desa, misalnya, menjadi figur penengah dalam konflik distribusi hasil, turut hadir dalam rapat KUD, dan menerima laporan pengaduan dari warga terkait masalah kemitraan. Namun, belum tersedia sistem pengawasan teknis dan struktural dari pemerintah desa terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan sesuai Permentan No. 98 Tahun 2013. Fungsi pengawasan masih berbasis pada laporan masyarakat, bukan instrumen kelembagaan formal. Dalam perspektif governance network (Klijn & Koppenjan, 2016), implementasi program plasma di Sukamara menunjukkan konfigurasi jejaring yang relatif seimbang dibanding daerah lain. Walaupun perusahaan masih dominan dalam hal teknis dan keuangan, terdapat ruang-ruang partisipatif bagi petani dan pemerintah desa, baik dalam forum formal seperti RAT maupun dalam jalur informal seperti mediasi sosial. Hubungan antaraktor bersifat kompleks dan saling tergantung. Tidak ada satu pihak pun yang mampu menjalankan program

tanpa keterlibatan pihak lain. Hubungan ini membentuk struktur jaringan kolaboratif yang memungkinkan proses negosiasi, distribusi manfaat, dan pemeliharaan stabilitas sosial di desa.

2. Implementasi Program Kemitraan Plasma Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Desa

Implementasi program kemitraan plasma kelapa sawit di Kabupaten Sukamara menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, khususnya di Desa Air Dua. Hal ini tercermin dari pola hubungan antaraktor yang saling melengkapi, adanya pembagian hasil yang cukup transparan melalui KUD, serta peran aktif pemerintah desa dalam menjaga kestabilan sosial dan memperkuat fungsi kelembagaan lokal. Perusahaan inti, dalam hal ini PT Kalimantan Sawit Kusuma, memainkan peran penting dalam menyediakan bibit kelapa sawit, pupuk, pelatihan teknis, akses terhadap pasar, mengatur distribusi hasil panen plasma, mencatat sistem keuangan seperti utang-piutang, serta menyelenggarakan rapat evaluasi dan laporan hasil setiap bulan kepada KUD yang mewakili para petani plasma. Selain itu, perusahaan menjamin pembelian hasil TBS dari kebun plasma, sehingga petani tidak perlu mencari pasar sendiri. Dengan adanya jaminan ini, petani merasa lebih aman dan memiliki kepastian pendapatan. Bahkan, beberapa anggota petani plasma juga bekerja di kebun mereka sendiri, yang secara teknis dikelola oleh perusahaan, dengan sistem kerja yang telah disepakati bersama.

Setiap bulan atau setidaknya setahun sekali, KUD menyampaikan laporan keuangan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Walaupun banyak petani belum sepenuhnya memahami rincian laporan tersebut karena keterbatasan literasi keuangan, namun secara umum mereka mengakui adanya mekanisme yang cukup transparan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional dan utang petani. Peran pemerintah desa tidak kalah penting. Kepala Desa Air Dua menjelaskan bahwa pihaknya aktif sebagai fasilitator dan penengah, terutama ketika terjadi ketidaksepakatan antara petani dengan KUD atau perusahaan. Pemerintah desa juga selalu dilibatkan

dalam forum-forum resmi seperti RAT. Walaupun tidak memiliki kewenangan teknis dalam kontrak, pemerintah desa tetap memantau pelaksanaan program dan menerima pengaduan dari warga, terutama menyangkut transparansi dan potongan hasil. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan sosial yang cukup kuat di tingkat desa, yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan antara petani dan pihak perusahaan.

Dibalik keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi peningkatan kesejahteraan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman petani terhadap isi kontrak kemitraan, mekanisme pembagian hasil, dan perhitungan biaya produksi. Keterbatasan ini menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap informasi yang diberikan oleh KUD dan perusahaan. Meskipun KUD menyampaikan laporan, belum semua petani memiliki kemampuan untuk mengevaluasi atau mempertanyakannya secara kritis. Selain itu, KUD juga menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan penguatan kapasitas kelembagaan. Menurut pengurus KUD, banyak anggota yang masih berorientasi hanya pada hasil akhir (pendapatan), tanpa menyadari pentingnya proses produksi dan perawatan kebun. KUD pernah mendapatkan pelatihan dari dinas koperasi, tetapi pendampingan tersebut tidak berkelanjutan, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan belum sepenuhnya tercapai.

Dari sisi perusahaan, meskipun sudah menjalankan sebagian besar kewajibannya sesuai peraturan (termasuk realisasi lahan plasma minimal 20%), mereka juga menghadapi kendala. Di antaranya adalah ketidakteraturan administrasi KUD dan dinamika sosial politik lokal. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan merencanakan sistem kemitraan digital yang dapat memberikan informasi hasil, potongan biaya, dan distribusi 9 pendapatan secara lebih terbuka dan dapat diakses petani secara mandiri. Langkah ini dinilai strategis dalam menciptakan transparansi jangka panjang. Dampak nyata dari program ini adalah adanya peningkatan penghasilan bagi petani plasma. Sebagian besar petani merasa terbantu secara ekonomi, karena kebun plasma memberikan pendapatan tambahan yang rutin. Bagi desa, program ini juga memperkuat daya beli masyarakat, membuka lapangan

pekerjaan, serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal seperti warung, bengkel, dan usaha kecil lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan desa berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi program kemitraan plasma di Kabupaten Sukamara khususnya di Desa Air Dua menunjukkan bahwa ketika hubungan antara petani, perusahaan, KUD, dan pemerintah desa berjalan secara terbuka dan sinergis, maka kemitraan tidak hanya menjadi alat produksi, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan kolektif. Model ini layak untuk dijadikan referensi oleh daerah lain dalam mengembangkan sistem kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan.

a. Saling Ketergantungan Antaraktor

Implementasi program kemitraan plasma kelapa sawit di Kabupaten Sukamara menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh adanya kebun plasma itu sendiri, tetapi juga oleh kekuatan hubungan antaraktor dalam sistem kemitraan. Perusahaan inti, petani plasma, KUD, dan pemerintah desa saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan program ini secara efektif. Perusahaan tidak dapat menjalankan bisnis plasma tanpa keterlibatan masyarakat desa, yang menyediakan lahan dan tenaga kerja. Di sisi lain, petani juga sangat bergantung pada perusahaan untuk penyediaan bibit unggul, teknologi pertanian, sistem pemupukan, pembukaan lahan, dan akses pasar.

KUD sebagai lembaga perantara juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kepercayaan dari petani dan komitmen perusahaan. Lembaga ini mengelola seluruh proses pencatatan hasil produksi, distribusi keuntungan, dan penyelesaian administrasi keuangan antara petani dan perusahaan. Bahkan, pemerintah desa pun turut berperan dalam menciptakan iklim sosial yang kondusif dan menjadi fasilitator ketika muncul persoalan atau konflik 10 horizontal antaraktor. Ketergantungan yang seimbang ini menunjukkan bahwa tidak ada aktor tunggal yang dapat menjalankan program secara terisolasi.

b. Pertukaran Sumber Daya

Pertukaran sumber daya menjadi aspek penting dalam mendukung berjalannya kemitraan plasma yang produktif. Dalam konteks Kabupaten Sukamara, pertukaran ini berlangsung dalam berbagai

bentuk: sumber daya finansial, teknis, sosial, dan kelembagaan. Perusahaan inti menyediakan sumber daya berupa bibit unggul, pupuk, teknologi pertanian modern, pelatihan teknis, serta pembukaan akses terhadap pasar hasil produksi. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional di lapangan, termasuk mempekerjakan petani plasma untuk bekerja di kebun mereka sendiri, yang teknis pelaksanaannya dikendalikan oleh perusahaan.

Sementara itu, petani plasma menyumbangkan lahan mereka sebagai basis produksi dan tenaga kerja yang terlibat langsung di lapangan. Meski mereka tidak sepenuhnya mengelola kebun secara mandiri, mereka tetap mendapatkan keuntungan dari hasil panen TBS (Tandan Buah Segar) melalui skema bagi hasil setelah dikurangi biaya produksi dan utang. Perusahaan inti sebagai pengelola menjadi pusat administrasi yang mencatat seluruh alur pendapatan, pembiayaan, dan distribusi hasil. Mereka juga menyelenggarakan rapat evaluasi, menyampaikan laporan keuangan, dan menjaga jalur komunikasi antara KUD kepada petani plasma.

Pemerintah desa memberikan dukungan dalam bentuk legitimasi sosial dan fungsi fasilitasi ketika terjadi konflik. Mereka juga memantau pelaksanaan 11 program agar sesuai dengan ketentuan regulatif, meskipun belum memiliki sistem pengawasan teknis yang terstruktur. Pertukaran sumber daya ini berlangsung dalam konteks yang saling melengkapi, tetapi masih menunjukkan ketimpangan dalam hal informasi dan pengambilan keputusan, karena perusahaan tetap memegang kendali utama. Oleh karena itu, meskipun sumber daya disalurkan kepada semua pihak, penguatan kapasitas petani dan koperasi masih sangat diperlukan agar tercipta keseimbangan yang lebih adil dan setara (Kusumastanto & Wahyudi, 2020; Saragih et al., 2021).

c. Proses Negosiasi

Negosiasi antaraktor dalam kemitraan plasma di Sukamara berlangsung dalam dua bentuk: formal dan informal. Secara formal, KUD menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi forum utama bagi petani untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, atau keluhan terkait pengelolaan hasil dan administrasi. Dalam forum ini, laporan keuangan disampaikan secara terbuka

oleh pengurus KUD dan perusahaan juga biasanya memberikan rekapitulasi hasil produksi serta pendapatan. Akan tetapi, efektivitas forum ini masih terbatas karena tidak semua petani memahami isi laporan secara mendalam. Kurangnya literasi ekonomi dan administrasi menjadi penghalang partisipasi aktif dari petani dalam proses negosiasi formal. Sementara itu, secara informal, proses negosiasi terjadi melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Ketika ada ketidakpuasan petani terhadap potongan biaya produksi, pembagian hasil, atau pengelolaan teknis kebun, kepala desa menjadi mediator yang menjembatani dialog antara petani, KUD, dan perusahaan. Peran informal ini sangat penting karena seringkali menjadi jalur tercepat dalam menyelesaikan konflik yang tidak bisa dituntaskan melalui forum resmi. Namun, efektivitas proses negosiasi tetap bergantung pada kualitas relasi sosial antaraktor dan keberpihakan pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat.

Proses Negosiasi Negosiasi antaraktor dalam kemitraan plasma di Sukamara berlangsung dalam dua bentuk: formal dan informal. Secara formal, KUD menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi forum utama bagi petani untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, atau keluhan terkait pengelolaan hasil dan administrasi. Dalam forum ini, laporan keuangan disampaikan secara terbuka oleh pengurus KUD dan perusahaan juga biasanya memberikan rekapitulasi hasil produksi serta pendapatan. Akan tetapi, efektivitas forum ini masih terbatas karena tidak semua petani memahami isi laporan secara mendalam. Kurangnya literasi ekonomi dan administrasi menjadi penghalang partisipasi aktif dari petani dalam proses negosiasi formal. Sementara itu, secara informal, proses negosiasi terjadi melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Ketika ada ketidakpuasan petani terhadap potongan biaya produksi, pembagian hasil, atau pengelolaan teknis kebun, kepala desa menjadi mediator yang menjembatani dialog antara petani, KUD, dan perusahaan. Peran informal ini sangat penting karena seringkali menjadi jalur tercepat dalam menyelesaikan konflik yang tidak bisa dituntaskan melalui forum resmi. Namun, efektivitas proses negosiasi tetap bergantung pada kualitas relasi sosial antaraktor dan keberpihakan

pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kemitraan plasma kelapa sawit di Desa Air Dua, Kabupaten Sukamara, menunjukkan praktik kemitraan yang dikelola secara dominan oleh perusahaan inti, namun tetap dilandasi oleh prinsip transparansi dan komunikasi terbuka. Seluruh aspek teknis dan administratif termasuk pembukaan lahan, pemeliharaan kebun, pemanenan, pencatatan keuangan, pembiayaan, hingga distribusi hasil dijalankan oleh perusahaan PT Kalimantan Sawit Kusuma. Namun, perusahaan secara rutin mengadakan rapat evaluasi bulanan yang melibatkan pengurus KUD sebagai representasi petani. Dalam rapat ini, perusahaan menyampaikan laporan mengenai biaya produksi, rekap panen, utang-piutang, serta skema pembagian hasil. Hal ini memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap keterbukaan, meskipun peran pengambilan keputusan tetap berada di tangan perusahaan. Keterbukaan ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga kepercayaan dalam jejaring kemitraan. Meskipun petani belum sepenuhnya mampu memahami seluruh laporan keuangan secara kritis, keberadaan forum rutin menjadi ruang penting untuk menjembatani informasi dan membangun koordinasi antaraktor. Peran KUD dalam hal ini menjadi lebih kepada penghubung administratif dan komunikatif, yang menyampaikan laporan dan aspirasi petani kepada perusahaan.

Referensi

- Abdul, I. (2023). Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ambarsari, D. C. (2021). Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah. Jakarta: The PRAKARSA
- Asik, I. (2017). Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dalam Pola Kemitraan Masyarakat di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

eJournal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 849–860.

- Bere, N., Pudjiastuti, A. Q., & Setiaji, J. (2024). Analisis Kinerja Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Jatiwaringin Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian (JAKP)*, 7(2), 141–150
- Buku Ringkasan Riset BPDPKS. (2022). Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta Pusat. <https://program-riset.bpdpk.or.id/>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). Governance Networks in the Public Sector. Routledge.
- Kurniawan, A. I. A., Arsyad, M., & Yusuf, B. (2021). Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Plasma PTPN XIV Unit Asera terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 181–188.
- Kusumastanto, T., & Wahyudi, R. D. (2020). Peran jejaring aktor dalam pengembangan kemitraan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 9(1), 31–44.
- Lesmana, W., & Jumansyah. (2024). Evaluasi Kebijakan Kemitraan Inti Plasma di Kampung Mujan Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 11(2), 238–247.
- Nahrawi, H., Kurniawan, D. S., & Mahardika, S. A. (2021). Kolaborasi jaringan dan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan berbasis desa. *Jurnal Ilmu Sosial Nusantara*, 10(1), 58–75.
- Parlina, E., Yusran, R., & Alhadi, Z. (2022). Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit oleh KUD Air Manis dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sikapas. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(2), 116–119.
- Saragih, B., Lubis, D. P., & Nugroho, B. A. (2021). Kolaborasi aktor dalam jaringan kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 17(3), 215–226
- Widayana, E. (2019). Kelembagaan KUD PIR Kelapa Sawit. Universitas Sriwijaya.
- Widayana, E. (2018). Perilaku Rumah Tangga Petani Plasma Kelapa Sawit. Universitas Sriwijaya.